

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH (KBKS) DI KAMPUNG BUANTAN LESTARI KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK

Fajar Alan Syahrier

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Alanfajar17@gmail.com

*Corresponding author

Abstract

The Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) Empowerment Program in Buntan Lestari Village, Bunga Raya District, Siak Regency, is an initiative to improve the welfare and empowerment of the local community. This research aims to conduct an in-depth analysis of the effectiveness and impact of the program implementation. The research method used is descriptive qualitative method. Data was collected through interviews with relevant parties, direct observation in the field, and analysis of documents related to the program. The results showed that the KBKS program was carried out in the form of skills training, religious education, and local potential development. The existence of active community participation in various program activities shows the high level of awareness and enthusiasm of residents towards empowerment. The KBKS program also makes a positive contribution to increasing the community movement that lays the foundation for the framework and agenda of socio-cultural development reform in an effort to create a community of faith and devotion.

Keywords: Program, Village, Government, Empowerment, Community

Abstrak

Program Pemberdayaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas dan dampak dari implementasi program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen terkait program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KBKS dilakukan dalam bentuk melalui pelatihan keterampilan, pendidikan bernilai Agamis, dan pengembangan potensi lokal. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan program menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan antusiasme warga terhadap pemberdayaan. Program KBKS juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan gerakan masyarakat yang meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Kata Kunci: Program, Kampung, Pemerintah, Pemberdayaan, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang sekarang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap

kemiskinan dan ketidakberdayaan (Hajar, Tanjung, & Tanjung, 2018). Pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya atau potensi, dan kemampuan yang terdapat dalam individu maupun kelompok (Deswimar, 2014). Pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan yang identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya (Anwas, 2013).

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Amir Syamsuadi et al., 2023). Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amir Syamsuadi, Hartati, Trisnawati, Elvitaria, et al., 2020).

Respon masyarakat terhadap pemberdayaan sangat menentukan hasil pemberdayaan itu sendiri (Syahrier, 2015). Pemerintah memegang peran dalam pembuat kebijakan pemberdayaan dan pembangunan yang akan dilakukan (Amir Syamsuadi & Febriani, 2023). Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa (Mustanir, Razak, Koisin, Fitrianto, & ..., 2022). Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa (Trisnawati, Syamsuadi, Arisandi, Elvitaria, & Hartati, 2023). Pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri

individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan capaian atau yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya (Endah, 2020). Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan kebijakan yang berupa Peraturan Bupati Siak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Siak (Ningsih, 2019).

Pasal (1) Ayat (9) Kampung Binaan Keluarga Sakinah di singkat KBKS adalah Kelurahan/ di Kabupaten Siak yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan pembinaan Keluarga Sakinah. Ayat (10) Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal (2) Maksud dari kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah suatu usaha Pemerintah Kabupaten Siak untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pengamalan agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Pasal (3) Tujuan dari kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia Pasal (4) Ayat (1) Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah sebagai suatu gerakan masyarakat yang meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia.

STUDI LITERATUR

Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lain, maka dikemukakan beberapa kajian terdahulu sebagai pembanding penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu

pada konteks penelitian, titik fokus dan tentunya pada temuan penelitiannya, sehingga dapat dilihat ada atau tidaknya kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Pertama, Penelitian dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Bali Dalam Kegiatan Gotong royong (Studi Sakti Buana Seputih Banyak Lampung Tengah). I Wayan Agus Setiawan (2017) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat etnis Bali dalam kegiatan gotong-royong di Kampung Sakti Buana. Pada tahap perencanaan pembangunan, tahap pelaksanaan pembangunan, Pada tahap evaluasi pembangunan dan Pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan, Tema penelitian tentang partisipasi masyarakat. Obyek penelitian yang berbeda, pada penelitian penulis difokuskan juga kepada faktor kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program (Setiawan, 2016).

Kedua penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Partisipasi Perempuan terhadap Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau oleh Nursyahira (2017) Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi perempuan terhadap keberhasilan Partisipasi masyarakat. Masing-masing penelitian tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat, berdasarkan studi kasus dan dibahas secara substantif sesuai dengan obyek permasalahan yang diteliti. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai pelengkap dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini berusaha menjelaskan Analisis Program Pemberdayaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Di Kampung Buntan Lestari Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak.

Menurut Pranarka dan Muljarto (dalam Anwas), pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan dan sebagainya. Pemberdayaan juga memiliki makna menghidupkan kembali tatanan nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu dan masyarakat (Anwas, 2013). Misalnya menghidupkan kembali sifat gotong royong dan tolong menolong dalam masyarakat Indonesia terutama di daerah perkotaan, merupakan salah satu wujud atau bentuk pemberdayaan.

Pemberdayaan (*empowerment*) lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks negara Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya (Amir Syamsuadi & Zainuddin, 2018).

Pemberdayaan merupakan bagian terpenting yang harus mendapat perhatian khusus bagi pemerintah (Amir Syamsuadi, Hartati, Trisnawati, & Arisandi, 2020). Sebagaimana dalam pemberdayaan pemerintah mempunyai peran serta baik sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yang tentunya tidak hanya sekedar jadi sebutan semata, namun perlu diimplementasikan agar antara ucapan dan prakteknya dapat berjalan sesuai dengan harapan (Zainuddin, Syamsuadi, & Yahya, 2017). Pemerintah harus jeli melihat keadaan yang ada pada masyarakat, kemudian selalu mencari alternatif alternatif lain untuk membantu masyarakat untuk mencari ide atau gagasan yang dapat dijadikan sebagai peluang dalam kontek pemberdayaan.

Dalam konteks pemberdayaan, paradigma memiliki peran untuk membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang kita gunakan untuk meneliti dan melakukan intervensi atas masalah tersebut. Begitu juga paradigma akan mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, apa yang tidak ingin kita lihat, dan apa yang tidak ingin kita ketahui. Paradigma pula yang akan mempengaruhi pandangan seseorang mengenai apa yang 'adil dan tidak adil', baik-buruk, tepat atau tidaknya suatu program dalam memecahkan masalah sosial.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuatpotensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Soeprodjo, Raden Gideon Ruru, Joorie Londa, 2020). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencanadan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran

atau output (pencapaian sasaran, efektifitas, dan efisiensi). Efektifitas diartikan sebagai rasio antara realisasi dengan target (yang direncanakan), juga rasio tersebut lebih besar dari satu berarti efektif, dan sebaliknya jika rasio tersebut lebih kecil dari satu maka berarti tidak efektif. Efisiensi dimaksudkan jika dapat dilakukan penghematan atau penekanan pemborosan, dengan demikian biaya produksi per unit dapat ditekan kebawah.

Efisiensi adalah suatu keadaan dimana terdapat penghematan dan sebaliknya jika terdapat pemborosan berarti inefisiensi, dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien (A Syamsuadi, Hartati, & Trisnawati, 2022).

Penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal pula. Konsep pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk dari pembangunan yang berpusat pada manusia. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan bentuk pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat mampu berdaya, memiliki daya saing, menuju kemandirian. Pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara

eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

1. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah meliputi:
2. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
3. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
4. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Proses pemberdayaan juga dapat terjadi akibat adanya faktor struktur peluang yang meliputi akses informasi, tingkat partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal. Pemanfaatan berbagai faktor tersebut secara maksimal menciptakan

peningkatan keberdayaan baik pada tingkat individu maupun kolektif, dan kemampuan ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan penguatan lembaga lokal dalam meraih berbagai hasil seperti peningkatan kesejahteraan anggota. Program pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan konsep pemberdayaan berbasis masyarakat (*community-based*). Proses pemberdayaan masyarakat untuk melahirkan masyarakat yang memiliki sifat ataupun ciri-ciri masyarakat berdaya seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Prospek pendekatan *community-based* menyimpan sejumlah konteks formal maupun informal yang berpotensi menjadi tantangan yang menghambat pengelolaan daya berbasis masyarakat. Ketiadaan dukungan pemerintah dalam bentuk kejelasan hak-hak pengelolaan sumber daya alam berpotensi melahirkan praktik-praktik degradasi dan pencurian yang dikendalikan oleh jaringan pencurian. Meskipun secara normatif melibatkan dan partisipasi masyarakat diakui oleh berbagai kebijakan, dalam tataran implementasi kebijakan-kebijakan pusat tersebut perlu didukung oleh kebijakan daerah untuk menguatkan posisi masyarakat, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih merujuk kepada sifat data yang akan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kepada sumber pengumpulan

data, penelitian ini digolongkan kepada jenis field research (penelitian lapangan). Jenis ini digunakan karena data yang dikumpulkan besumber dari keadaan alamiah di mana fenomena penelitian ditemukan. Keadaan alamiah yang dimaksud adalah kehidupan sehari-hari objek-objek yang sedang dipelajari. Tujuannya adalah untuk memahami, mengamati, dan berinteraksi dengan orang-orang dalam keadaan alamiahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Program Pemberdayaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) Di Kampung Buntan Lestari . Adapun Kampung Buntan Lestari berada di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak (Syahrier, 2022). Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini dikategorikan ke dalam Exploratory research (penelitian eksplorasi). Exploratory research digunakan untuk menyelidiki fenomena yang belum dipahami dengan baik untuk menggali secara mendalam tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu,

PEMBAHASAN

Kampung Buntan Lestari merupakan Kampung pertama yang terdaftar sebagai peserta program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS), dengan Jumlah penduduk yang beragama islam yaitu 2.540 orang, dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 689 orang, masyarakat yang beragama islam inilah yang menjadi sasaran program KBKS sebagai warga binaan di Kecamatan Bungaraya sejak tahun 2015.

Gambar 1. Kampung Buntan Lestari



Sumber: Data Penelitian, 2024

Sebagaimana kriteria dalam penetapan Kampung Binaan Keluarga Sakinah, dijelaskan pada Pasal 5, Ayat: (1) Kampung /Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah adalah yang penduduknya mayoritas beragama Islam. (2) Penghulu, Perangkat dan RT/RK serta Tokoh Masyarakat di kampung tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam pembangunan keagamaan. (3) Masyarakat mampu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah baik dibidang pembangunan keagamaan maupun di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. (4) Memiliki sarana ibadah dan lembaga keagamaan yang memadai. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan program menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan antusiasme warga terhadap pemberdayaan.

Partisipasi ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti mengikuti kegiatan sosial, pembangunan komunitas, program edukasi, atau bahkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Melalui kombinasi berbagai kegiatan di atas, diharapkan masyarakat di kampung binaan dapat memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang cukup untuk mandiri, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis. Program ini juga dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan komunitas mereka.

Program Kampung Sakinah dibentuk dari sebuah Desa/ yang mendapat pembinaan khusus dari aparaturnya Pemerintah Daerah, baik dari Kementerian Agama maupun Pemerintah daerah setempat. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembinaan keagamaan. Program ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yang pernah dilaksanakan di beberapa daerah dengan tujuan yang sama. Beberapa program yang menjadi tujuan utama pada sakinah ini adalah bagaimana caranya melakukan pembinaan terhadap Majelis Taklim, Keluarga Sakinah, dan juga pemberdayaan Jamaah Masjid dan Musholla yang melibatkan seluruh Masyarakat untuk melaksanakan Sholat lima waktu di Masjid dan Musholla. Tujuan dari KBKS adalah untuk mewujudkan kehidupan beragama dalam keluarga dengan menciptakan suasana keagamaan yang bebas dari baca tulis Al quran, ibadah, dan akhlak mulia.

Tabel 1.

Kegiatan Program Pemberdayaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) Di
Kampung Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak

No	Nama Kegiatan	Status Kegiatan
1	Kegiatan Membaca Al-qur'an	Terlaksana
2	Kegiatan Shalat Subuh Berjamaah	Terlaksana
3	Pengajian Bulanan	Terlaksana
4	Kegiatan Ceramah Agama per 3 bulan	Terlaksana
5	Kegiatan Keagamaan	Terlaksana
6	Kegiatan Gotong Royong	Terlaksana

Sumber: Data Penelitian, 2024

Serta KBKS ini gunanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan keluarga, kesehatan, dan kestabilan ekonomi keluarga, serta membangun hubungan fungsional yang seimbang dengan lingkungan. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan dan kesejahteraan komunitas mereka. Selain itu, partisipasi aktif juga dapat menghasilkan berbagai manfaat, seperti peningkatan kualitas hidup, pembangunan sosial dan ekonomi, serta penguatan hubungan antarwarga. Pemberdayaan masyarakat melibatkan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat merupakan indikator penting dari efektivitas upaya pemberdayaan dan pembangunan komunitas. Program Pemberdayaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pengembangan potensi lokal merupakan pendekatan yang holistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dijelaskan terkait program ini:

1. Pelatihan Keterampilan:

Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat agar mereka dapat mengembangkan usaha mandiri dan meningkatkan keberdayaan ekonomi. Contoh Kegiatan: Pelatihan keterampilan seperti pertanian, kerajinan tangan, teknologi informasi, atau keterampilan lainnya.

2. Pendidikan:

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di kampung binaan, termasuk pendidikan formal dan informal. Contoh Kegiatan: Program beasiswa, bimbingan belajar, pembukaan pusat pembelajaran, dan pengenalan teknologi pendidikan.

3. Pemberdayaan Keluarga Sakinah:

Mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkualitas melalui pendekatan yang mencakup nilai-nilai kekeluargaan dan agama. Contoh Kegiatan: Pelatihan parenting, konseling keluarga, pendampingan spiritual, atau program-program yang memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah yang ada di Kabupaten Siak, dapat menjadi program percontohan bagi daerah lain. Karena Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah merupakan satu-satunya yang ada di Sumatera. Ini terbukti, karena untuk yang ketiga kalinya Pelatihan TOT (*Training of Trainer*) Kampung Binaan Keluarga Sakinah.

Gambar 2. Pelatihan TOT KBKS di Kabupaten Siak



Sumber: <https://infosiak.com/>

Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini memadukan pembangunan keagamaan, ekonomi, keluarga, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan akhlak

mulia bangsa. Ada beberapa bentuk pembinaan, diantaranya Pembinaan Keagamaan atau Kerohanian, Pengentasan Buta Aksara Al-Quran, Shalat Berjamaah, Maghrib Mengaji dan gemar berinfaq.

Beberapa aspek yang mungkin berkontribusi terhadap efektivitas pemberdayaan dalam konteks KBKS yakni:

1. Masyarakat yang aktif terlibat dan berpartisipasi dalam program pemberdayaan, menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan keluarga.
2. Adanya upaya penguatan kapasitas masyarakat, baik melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, atau bimbingan teknis, dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya dan mengambil peran aktif dalam pembangunan keluarga.
3. Dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah desa (kampung) dalam program dapat meningkatkan efektivitasnya. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
4. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, dapat menciptakan sinergi dan memperluas dampak positif program pemberdayaan.
5. Pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat memastikan bahwa inisiatif sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.
6. Sistem yang baik untuk pemantauan dan evaluasi program memungkinkan identifikasi tantangan dan perbaikan yang diperlukan secara cepat. Ini dapat memastikan bahwa program tetap relevan dan efektif seiring waktu.
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga: Keberhasilan program dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan keluarga, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun aspek-aspek lain yang relevan.
7. Jika program KBKS memberikan penekanan pada nilai-nilai keluarga sakinah, seperti keharmonisan keluarga, tanggung jawab bersama, dan etika moral, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan keluarga.

8. Kemampuan program untuk bersifat fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan situasi atau kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan daya tahan dan keberlanjutan inisiatif.

KESIMPULAN

Program Pemberdayaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KBKS dilakukan dalam bentuk melalui pelatihan keterampilan, pendidikan bernilai Agamis, dan pengembangan potensi lokal. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan program menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan antusiasme warga terhadap pemberdayaan. Program KBKS juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan gerakan masyarakat yang meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi program KBKS seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar stakeholder. Oleh karena itu, disarankan agar pihak terkait terus meningkatkan dukungan dan koordinasi untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan program dan diperlukan langkah dan upaya lebih lanjut dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program KBKS ini kedepannya.

REFERENSI

- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41–52.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Tanjung, Y. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Mustanir, A., Razak, M. R. R., Koisin, E., Fitrianto, M. R., & ... (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. books.google.com.

- Ningsih, A. (2019). Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Di Kecamatan Siak).
- Setiawan, I. W. A. (2016). TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIS BALI DALAM KEGIATAN GOTONGROYONG (Studi Kampung Sakti Buana Seputih Banyak Lampung Tengah).
- Soeprodjo, Raden Gideon Ruru, Joorie Londa, V. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89).
- Syahrier, F. A. (2015). Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Studi pada Pasar Kaget Riau Indah Lestari Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 1–11.
- Syahrier, F. A. (2022). DINAMIKA KEBIJAKAN LAND CONVERSION DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 5(1), 18–36.
- Syamsuadi, A, Hartati, S., & Trisnawati, L. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018. *Al-Amwal*.
- Syamsuadi, Amir, Arisandi, D., Hartati, S., Trisnawati, L., Elvitaria, L., & Nugroho, S. S. (2023). Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Di Riau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8436–8450.
- Syamsuadi, Amir, & Febriani, A. (2023). THE INFLUENCE OF STUNTING REDUCTION PROGRAM PERFORMANCE ON THE GROWTH OF UNDER-FREE CHILDREN IN ROKAN HULU DISTRICT. *JIKA (Jurnal Ilmu Kesehatan Abdurrab)*, 1(2), 27–38.
- Syamsuadi, Amir, Hartati, S., Trisnawati, L., & Arisandi, D. (2020). Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM). *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2(2), 114–128.

Syamsuadi, Amir, Hartati, S., Trisnawati, L., Elvitaria, L., Arisandi, D., & Syahrier, A. F. (2020). *Bijak Mengelola Desa: Sebuah Tinjauan Awal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Taman Karya.

Syamsuadi, Amir, & Zainuddin, M. (2018). STRATEGI POS PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENGUATAN FUNGSI KELEMBAGAAN SOSIAL DI KELURAHAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 1(2), 98–109.

Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Arisandi, D., Elvitaria, L., & Hartati, S. (2023). STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MELALUI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU BERBASIS DIGITAL. *Al-Amwal*, 12(1), 1–12.

Zainuddin, M., Syamsuadi, A., & Yahya, M. R. (2017). PEMBERANTASAN BUTA AKSARA AL-QURAN ANAK JALANAN DI SIMPANG PASAR PAGI PEKANBARU. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 7–14.